

HASIL CEK_60140762

by Rifki Khoirudin Cek_60140762

Submission date: 25-Jun-2021 02:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1611930372

File name: CEK_60140762.docx (88.59K)

Word count: 5194

Character count: 34167

2
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN DI PULAU JAWA

Daivy Olliffian,²³ Rifki Khoirudin²

- 1) Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
- 2) Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

ABSTRACT

Development aims to improve the welfare of the people. To improve welfare, it requires economic growth that is quite high, stable and equitable in income. High enough economic growth must be balanced with equity, so as not to create inequality. Growth is not a goal, but only a tool as a process to reduce poverty and reduce inequality in income distribution. Hence the reduction of inequality of income distribution is the essence of development results can be enjoyed fairly and equitably by all people, the problem of unequal income distribution will not arise. If the economic performance is better or is experiencing progress, then all people must also feel the impact of this progress in the form of an increase in the level of income. Because the distribution of income is very useful in increasing economic growth and development, it is important for us to know what factor affects the inequality of income distribution in Java. This variables used are economic growth, provincial minimum wages, open employment rate, degree of fiscal decentralization and growth in the human development index with multiple regression analysis for 2014-2019. The results showed that the only variables affecting income inequality were the provincial minimum wage and the open unemployment rate. The open unemployment rate variable has a coefficient value of -0.0502438. This means that when the exchange rate increases by Rp.1, income inequality will decrease by 0.0502438%. The open unemployment rate variable has a coefficient value of 0.0056812. This means that when the open unemployment rate increases by one percent, income inequality will increase by 0.0056812%. Meanwhile, economic growth, the degree of fiscal decentralization and the human development index have no effect on income inequality.

Keywords : degree of fiscal decentralization; economic growth;

Correspondence to : rifki.khoirudin@ep.uad.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi ini bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, tinggi, serta kestabilan distribusi pendapatan juga sama pentingnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Solusi untuk menghindari suatu ketimpangan yaitu dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi serta ekonomi yang kurang merata. Pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu solusi untuk mengatasi masalah, melainkan hal tersebut merupakan alat untuk mengatasi kemiskinan akan ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Oleh karena itu, mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah inti dari pembangunan. Selama setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara adil dan setara, masalah distribusi pendapatan yang tidak merata

tidak akan muncul. Jika kegiatan ekonomi membaik atau berkembang, masyarakat akan merasakan dampak dari perkembangan tersebut berupa peningkatan tingkat pendapatan. Memang, di bawah pengaruh perkembangan ini, tingkat pendapatan akan meningkat. Distribusi pendapatan sangat membantu dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa. Penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji secara analisis faktor yang mempengaruhi tingkat distribusi pendapatan di pulau Jawa. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat dispersi fiskal, dan indeks pembangunan manusia menggunakan analisis regresi dari tahun 2014 hingga 2019. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa satu-satunya variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah upah minimum negara dan tingkat pengangguran yang dilaporkan. Nilai koefisien pada variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar $-0,0502438$. Hasil dari nilai tersebut menandakan bahwa setiap peningkatan nilai tukar naik Rp. maka kesenjangan pendapatan akan berkurang sebesar $0,0502438\%$. Nilai koefisien untuk variabel Terbuka Pengangguran adalah $0,0056812$. Hasil ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1% pada tingkat pengangguran yang diumumkan, ketimpangan pendapatan meningkat sebesar $0,0056812\%$. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi, tingkat desentralisasi dan indeks pembangunan manusia tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci : derajat desentralisasi fiskal; pertumbuhan ekonomi,

Riwayat Artikel:

Received

Revised

Accepted

PENDAHULUAN

Pembangunan bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Peningkatan kesejahteraan membutuhkan pertumbuhan dan distribusi yang tinggi dan stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi pula dengan pemerataan hal tersebut agar tidak mengakibatkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya seperti kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, lokasi, serta suku, hal tersebutlah yang menentukan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Hal ini juga menjadi penyebab ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses agar melengkapi system kelembagaan dan peningkatan pendapatan per kapita serta rill

provinsi maupun Negara dalam jangka panjang (Arsyad, 2010).

Mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan adalah inti dari pembangunan. Pertumbuhan bukanlah tujuan, namun melainkan alat yang digunakan sebagai proses mengidentifikasi kemiskinan dan juga agar mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Kecuali setiap orang secara adil dan setara menikmati hasil pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, bahkan jika kinerja ekonomi membaik, masalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan muncul dan membaik atau membaik, semua orang akan membuat kemajuan ini. Salah satu bentuk pertumbuhan pendapatan.

Salah satu perbedaan antara masyarakat atau daerah maju dan tertinggal

adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar disparitas pendapatan, semakin besar disparitas distribusi pendapatan dan semakin besar disparitas pendapatan. Ini tidak bisa dihindari karena efek ekonomi dari produksi sempurna. Jika jarak antara kedua wilayah menyempit dengan pertumbuhan wilayah di mana mereka berada, berarti ada efek yang baik (negatif) karena ada efek riak ekonomi. Sebaliknya jika selisih antara kedua daerah lebih besar maka pengaruh terhadap proses polarisasi (*polarization effect*) kurang baik (negatif) (Kurniasih, 2013). Disparitas pendapatan di setiap daerah dapat dikaitkan dengan pembangunan yang cenderung berfokus pada pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari daerah yang berbeda dengan daerah yang telah maju. Hal tersebut tentunya memperkuat dalam pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah itu sendiri. Namun, pertumbuhan ekonomi masih relatif lemah di beberapa negara bagian. Menurut data BPS, laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia di tahun 2019 mencapai 5,02%. Hal tersebut yang berarti menandakan perekonomian yang positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara didorong oleh tingkat pertumbuhan ekonomi regional yang positif.

Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan disebut dengan (ketimpangan ekonomi) dan tingkat tingkat kemiskinan merupakan masalah yang sangat utama yang di alami banyak Negara terutama di Negara yang sedang berkembang dan Indonesia adlah salah satunya (Tulus, 2011). Jawa merupakan pusat dari perekonomian pemerintah, akan tetapi dalam situasi seperti ini tentunya banyak menimbulkan hal yang sangat menantang pembangunan selama ketimpangan itu adalah salah satu penyebab ketimpangan distribusi pendapatan.

Pada tahun 2019, DIY dengan indeks ketimpangan yang jauh lebih tinggi juga memiliki tingkat desentralisasi paling rendah dibandingkan dengan lima negara bagian lainnya (47%). Sebaliknya, lima negara bagian lain di Jawa lebih terdesentralisasi daripada DIY. DKI Jakarta merupakan

provinsi yang persebarannya paling luas yaitu 67,95%, dan kemudian disusul oleh provinsi lainnya di antara lain yaitu provinsi Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, serta Jawa Tengah yaitu dengan angka sebesar (66,75%), (66,11%), (64,25%), (61,55%).

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini digarapkan agar dapat mengurangi ketimpangan bagi daerahnya masing masing terutama di Pulau Jawa, dan juga tentunya akan memerlukan lebih banyak penelitian untuk melihat apakah hal yang dilakukan tersebut dapat memberikan dampak yang positif. Berdasarkan data yang telah ditunjukkan bahwasanya data tersebut memiliki tingkat indeks tertinggi di Provinsi DIY dan Provinsi DKI Jakarta, tingkat desentralisasi yang rendah dan PDRB perkapita di Pulau Jawa dan PDRB per kapita dibandingkan dengan pulau lainnya merupakan yang terendah.

Tingginya indeks gini di wilayah Jawa dan beberapa tingkat pendapatan yang tidak merata ini menunjukkan bahwa malah yang di hadapi sangat mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di wilayah Jawa. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan ke dalam bentuk hubungan ini. Aspek-aspek ini dapat menjadi tolak ukur pengambilan keputusan jika dapat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Pada tahap awal Kuznetz, ditentukan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, sebuah tren yang mengarah pada peningkatan kemiskinan. Dan setelah negara bergerak menuju pengentasan dalam hal kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2006).

Awal mula munculnya pertumbuhan ekonomi karena cenderung terkonsentrasi pada sektor industri modern dengan tingkat produktivitas dan upah yang begitu tinggi di suatu Negara. Meskipun penyerapannya begitu kecil terhadap tenaga kerja. Awalnya ketimpangan

distribusi pendapatan antara sektor industry dengan pertanian pertanian melebar begitu pesat tetapi tidak lama kemudian mengalami penyempitan. Ketimpangan pada distribusi pendapatan cenderung akan lebih besar dan tinggi di daerah yang sektor industrinya lebih maju dan modern dibandingkan dengan daerah yang sektor pertaniannya masih relative rendah maupun tetap. (Todaro, 2006).

(Soediyono, 1992) mengatakan bahwa ibusi pendapatan merupakan sebuah hasil yang telah dari masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, sebagai akibat masyarakat menerima faktor produksi negara milik sumber daya sebagai imbalan keberadaannya dengan modal. Sumber daya manusia dan kemampuan bisnis. Jadi kita dapat memahami bahwa pendapatan yang diperoleh di masyarakat adalah pengembalian yang diinginkan untuk pekerjaan yang diselesaikan. Pendapatan ini dihasilkan di sektor formal dan informal. (Sukirno 2006) mengatakan bahwa ada dua jenis distribusi pendapatan yaitu pendapatan yang relative yaitu yang membandingkan dan pendapatan yang diterima oleh kelompok pendapatan. Bagi hasil absolut adalah persentase orang yang menerima pendapatan di bawah pendapatan tertentu.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu alat ukur sebuah indicator yang penting daan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Menurut (Boediono, 1992) beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi alalah sebuah proses alat ukur untuk proses peningkatan suatu produksi di daerah dengan jangka panjang. Di Indonesia sendiri pertumbuhan suatu Negara ditentukan oleh Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi indikator yang digunakan di tingkat negara bagian atau daerah adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Teori pertumbuhan menurut Harrod Domar yaitu pertumbuhan yang dengan tinkat pertumbuhan PBD dilambangkan atau dirumuskan dengan (Y/Y) dan

ditentukan secara bersama-sama olehtingkat tabunan dari suatu Negara yaitu dilambangkan dengan (s) dan rasio modal dilambangkan dengan (k) . pertumbuhan di berbagai Negara tumbuh begitu cepat, setiap perekonomian tentunya perlu memerlukan tabungan Negara yang banyak dan juga memerlukan investasi pula dengan Negara lain, hal tersebut agar mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. (Todaro, 2006).

Teori pertumbuhan menurut Neo Klasik yang dilakukan oleh Robbert Solow, yaitu tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memperkuat dari teori yang telah dilakukan Harrod Domar yaitu dengan menambahkan faktor yang terjadi di suatu Negara diantaranya adalah tenaga kerja dan teknologi. Dengan menggunakan variabel lain yaitu variabel bebas yang telah diadaptasi dalam teknologi kedalam persamaan pertumbuhan. Perkembangan suatu teknologi di berbagai Negara mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih meningkat dalam jangka panjang sehingga pertumbuhan ekonomi ini tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang

3. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) ialah upah minimu yang telah pemerintah daerah/bupati negara bagian, terlepas dari sektor tertentu. Jika Pemerintah/Kota bermaksud untuk menyesuaikan Upah Minimum Pro⁵insi (UMK) yang bersangkutan, maka UMK yang bersangkutan harus lebih tinggi dari UMP. Jika UMK yang bersangkutan kurang dari atau sama dengan UMP, untuk itu pemerintah yang ada di daerah maupun kota tidak diperbolehkan mengatur. Adapun kriteria yang harus dilakukan dan telah berlaku untuk UMP di berbagai provinsi antara lain:

- 1) 10¹⁰ syarat Hak Hidup (KHL). Nilai KHL menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan usulan upah minimum. Setiap proposal harus menjelaskan peningkatan pendapatan riil pekerja, bukan peningkatan

nominal. Keputusan KHL akan dibuat pada Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

- 2) Indeks Harga Konsumen atau biasa disingkat dengan (IHK), pada kenyataan dan peraturannya berevolusi menjadi CPI, CPI sendiri adalah evolusi KHL. Hal ini karena selalu diperlukan untuk membandingkan komponen yang tercantum dalam KHL dengan evolusi IPC.
- 3) Memperluas kesempatan kerja. Kebijakan pengembangan suatu pendapatan yang telah didapat. Kejadian ini tentunya akan menyebabkan peningkatan produktivitas, dan meningkatkan ekspansi atau pertumbuhan bisnis (efek eksponensial) dan memperluas kesempatan kerja.
- 4) Gaji biasanya diterapkan secara regional. Tolok ukur penentuan upah minimum suatu wilayah adalah rasio upah negara yang bersangkutan dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, setiap kota berhubungan dengan daerah lain yang relevan atau terdekat. Dalam hal ini, setiap daerah harus menghubungi wilayah yang cenderung akan membatasi masyarakat sekitar untuk mendapatkan suatu kebutuhan akan informasi tentang pendapatan yang telah ditetapkan pada suatu daerah tertentu.
- 5) Kemampuan, pengembangan, dan kontinuitas perusahaan. Kemampuan, pertumbuhan, dan kesinambungan bisnis harus dipertimbangkan saat menentukan tawaran upah minimum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upah tetap dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengganggu pelaksanaannya.
- 6) Tingkat pemangungan suatu wilayah yang memengaruhi perekonomian, agar masyarakat dapat mengetahui seberapa besar nilai UMR di daerahnya masing-masing yaitu dengan menambahkan nilai tambah dari berbagai profesi pekerjaan. Selama hal tersebut masih

berlaku di setiap daerah maka hal tersebut akan berjalan dengan baik.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut (Soekirno, 2000) mengatakan bahwa besarnya suatu pengangguran dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pembagiannya antara lain:

- 1) Pengangguran terbuka
Pengangguran terbuka atau bisa juga disebut dengan pengangguran public ini ialah masyarakat yang bekerjanya tidak tetap. Tentu, jumlah pekerja terus bertambah, tetapi kesempatan kerja tidak, menyebabkan pengangguran terus-menerus. Selain itu, munculnya klaim pengangguran bukan karena kurangnya kesempatan kerja, tetapi karena penurunan kegiatan ekonomi seperti penurunan atau munculnya minat kerja karena kecanggihan industri penggunaan teknologi. Karena penurunan industrialisasi, banyak pekerjaan yang hilang.
- 2) Pengangguran tersembunyi
Pengangguran tersembunyi berhasil, namun tidak berjalan dengan lancar. Hal yang sering menyebabkan ini terjadi adalah begitu menumpuknya para pengangguran dan melebihi kapasitas untuk dipekerjakan. Semakin banyak pekerja di suatu perusahaan, semakin kurang produktif mereka. Kerja berlebihan ini disebut pengangguran tersembunyi.
- 3) Pengangguran setengah menganggur
Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan secara penuh karena tidak mempunyai bidang pekerjaan yang cukup. Karyawan merupakan profesi seorang yang bekerja dengan waktu kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun pekerjaan yang telah didapat yaitu biasanya bekerja kurang lebih 102 hari dalam seminggu, atau juga 1-4 jam kurang lebih dalam satu hari. Kemudian diklasifikasikan sebagai pengangguran dengan pekerjaan rendah.

4) Pengangguran musiman
Pengangguran musiman adalah pekerja³ tidak aktif karena dikaitkan dengan musim tertentu. Pengangguran musiman ini sering terjadi pada pekerja di sektor pertanian, dimana petani kurang aktif dalam pekerjaan pasca tanam dan pra panen. Jika petani tidak melakukan hal lain selama waktu ini, mereka akan kehilangan pekerjaan.

5. Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi¹⁴ fiskal ialah pembagian kewenangan oleh pemerintah daerah otonom kepada pemerintah daerah yang berwenang untuk melaksanakan suatu perintah yang telah ditetapkan melalui system yang telah berlaku di Negara Kesatuan Republic Indonesia atau biasa kita sebut dengan (NKRI). Pelaksanaan peraturan ini telah secara resmi dilakukan dan dimulai pada awal tahun 2001 pada bulan Januari. Pelaksanaan desentralisasi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan kemajuan dari suatu daerah, maka dari itu daerah yang telah memberlakukan peraturan ini akan sangat teratur apabila peraturan ini berjalan dengan baik dan benar oleh masyarakat maupun pemerintahnya.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu benda yang dapat dimanfaatkan sebagai mengelola perkembangan suatu perekonomian disuatu daerah tertentu. Saya pikir itu akan mendorong pelaksanaan pembangunan daerah melalui hubungan keuangan yang lebih baik dan, sebagai hasilnya, mempengaruhi situasi perekonomian yang nantinya akan menjadi lebih unggul.

Kebijakan desentralisasi fiskal ini bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Derajat independensi bagi pemerintah yang mengatur daerah otonom dengan dan pemerintah yang mengatur di daerah tertentu dapat kita pahami dengan mengukur seberapa penting derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal sendiri

pengukurannya menggunakan rasio dan skala rasio tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Rasio Total Pendapatan Daerah atau biasa disingkat dengan (PAD) dibandingkan dengan Total Penyerapan Daerah atau biasa disingkat dengan (TPD).
- 2) Rasio sumbangan dan bantuan pemerintah dibandingkan dengan PAD
- 3) Rasio TPD dibandingkan dengan Total Penyerapan Negara atau biasa disingkat dengan (TPN).

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau biasa disingkat dengan IPM) ini merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk mengukur hasil yang diperoleh dari suatu daerah tertentu. Akan tetapi pengertian ini sendiri tidak hanya akan mengukur besaran indeks pembangunannya sendiri. Indeks pembangunan manusia ini diukur menggunakan tiga dimensi: pendapatan, pendidikan dan ekonomi, dan ekonomi membaik. Negara ini mengadvokasi pendidikan dan perawatan kesehatan. Hal ini dikarenakan kedua faktor tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan potensi suatu negara untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Jika dilaksanakan secara serius dan sungguh-sungguh, kita berharap bangsa ini panjang umur sehat, ilmu asing dan hidup sejahtera (Badan Pusat Statistik, 2014).

¹⁹

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Adapun tipe data pada penelitian ini yang digunakan antara lain yaitu data sekunder yang di dapatkan dari situs resmi Badan Pusat Statistik atau biasa kita sebut (BPS) dengan menggunakan panel data. ¹⁷ Panel data sendiri merupakan penggabungan dari dua data yaitu data time series dan juga data cross-section. Data dari time series sendiri dari tahun 2014 sampai dengan 2019, data cross-sectional dalam urutan latitudinal di 6 provinsi bagian Jawa. Tujuan pada penelitian ini sendiri antara lain adalah bahwa variabel terkait yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya itu

sendiri, antara lain variabelnya yaitu pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, serta indeks pembangunan manusia. Datanya sendiri merupakan adalah data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu untuk dijadikan sampel. Datanya sendiri juga diperoleh secara skunder yaitu melalui kutipan buku-buku yang telah saya abaca, bahan bacaan seperti artikel maupun jurnal yang berkaitan engan menelitian saya ini.

Penelitian ini terdapat beberapa variabel terkait antara lain distribusi pendapatan atau biasa disebut indeks gini (Y), pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum provinsi (X2), tingkat pengangguran terbuka (X3), derajat desentralisasi fiskal (X4), serta indeks pembangunan manusia (X5).

Metode Penelitian Data

Metode penelitian pada penelitian ini khususnya datanya saya akses melalui website resmi BPS. Dan data yang saya gunakan adalah dari tahun 2014 hingga 2019 untuk enam provinsi di Pulau Jawa.

Metode Analisis

Hal ini bertujuan untuk mengolah data menggunakan analisis data kuantitatif dan agar dapat mengetahui seberapa kuat pengaruh akan variabel bebas erhadap variabel terkait. Maka dai itu peneliti menyarankan untuk menggunakan metode regresi data yaitu dengan data panel. Kemudian untuk metode yang menganalisis pada penelitian ini adalah metode analisis panel. Metode analisis data panel ini adalah gabungan antara data dari analisis time series dan juga data analisis cross-section.

$$IG = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 UMP + \beta_3 TPT + \beta_4 DDF + \beta_5 IPM + \mu$$

Dimana:

IG	=Indes Gini
PE	=PertumbuhanEkonomi
UMP	=Upah Minimum Provinsi
TPT	=Tingkat Pengangguran Terbuka
DDF	=Derajat DesentralisasiFiskal

IPM	=Indeks Pembangunan Manusia
β_0	=Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$	=Koefisienregresi
μ	=Variabelpengganggu

Estimasi Model Regresi Data Panel

(Widarjono, 2013) mengatakan bahwa terdapat bebrapa pendekatan yang menggunakan kuadrat terkecil (*common effect*), efek tetap dan kumpulan efek acak ketika pengestimasiian pada model regresi menggunakan panel data.

Pendekatan Model Estimasi

Agar dapat mentukan model mana yang akan digunakan dan paling tepat antara lain adalah model common effect dan model fixed effect, sehingga perlu dilakukannya pengujian menggunakan uji chow. Dalam pemilihan model yag akan digunakan antara lain adalah fixed effect atau common effect, aka dari itu peneliti perlu melakukan riset menggunakan uji hausman.

Uji Hipotesis

Unuk melakukan pengujin hipotesis yang tepat untuk digunakan dalam riset yang saya lakukan antara lain adalah uji koefisien determinasi atau biasa disebut (uji r²), uji koefisien atau biasa disebut (uji f), uji apriori, serta uji koefisien regrsi atau biasa disebut dengan (uji t).

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data Penelitian

Survey yang saya lakukan pada penelitian ini menggunakan data skunder yang saya akses melalui internet yaitu di BPS, Bapennas, serta Bappeda, kemudian saya jug abaca-baca buku dan artiket serta jurnal yang saya bisa akses melalui internet yang penelitiannya serua dengan judul penelitian saya. Tujuan dalam penelitian saya ialah agar melihat seberapa besar pengaruh akan vaiabel pertumbuhan ekonomi, upa minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi fiskal, serta indeks pembangunan manusia. survei Ini tentang mencari tahu apa yang harus dilakukan. Artinya, distribusi pendapatan atau

ketimpangan pendapatan. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan enam provinsi di bagian Jawa dan menghabiskan enam tahun antara 2014 sampai 2019.

Hasil dan Analisis Data
Model Estimasi Common Effect

Tabel 1
Hasil Model Common Effect

Y	Coef	Std.Err.	t
X1	.0197652	.0109715	1.80
X2	-.0502438	.0136327	-3.69
X3	.0056812	.0018185	3.12
X4	-.0161894	.0217093	-0.75
X5	.0051003	.0010229	4.99
_cons	.6066789	.126547	4.79

Sumber: Data Diolah 2021

Model Estimasi Fixed Effect

Tabel 2
Hasil Model Fixed Effect

Y	Coef	Std.Err.	t
X1	.0139336	.007758	1.80
X2	-.0245453	.0186401	-1.32
X3	.0028624	.0043081	0.66
X4	-.0315544	.0179451	-1.76
X5	.0037338	.0039381	-0.95
_cons	.9459631	.184844	5.12

Sumber: Data Diolah 2021

Pemilihan Model Regresi
(Uji Chow)

Tabel 3
Hasil Uji Chow

Prob>F = 0.0031
 Sumber: Data diolah 2021

Nilai probabilitas cross-effect menggunakan perhitungan Starter 14 adalah 0,0031, yang kurang dari 5%, hasil penting untuk penerimaan HO yang sukses dan penolakan H1. Oleh karena itu, hasil regresi menunjukkan bahwasanya model yang tepat yang akan digunakan untuk pengujian uji chow ini antara lain adalah dengan menggunakan estimasi model fixed effect.

Uji Hausman

Tabel 4
Hasil Uji Hausman

Prob>chi2 = 0.0205
 Sumber: data diolah 2021

Nilai prob.chi2 menggunakan perhitungan starta 14 adalah 0,0205 yang kurang dari 5%, sehingga menerima HO

dan tidak menerima H1. Oleh karena itu, pengujian uji hausman ini merupakan model terbaik yang dapat memperkirakan efek dari random effect model.

Model Estimasi Random Effect

Tabel 5
Hasil Regresi Random Effect

Y	Coef	Std. Err.	Z
X1	.0197652	.0109715	1.80
X2	-.0502438	.0136327	-3.69
X3	.0056812	.0018185	3.12
X4	-.0161894	.0217093	-0.75
X5	.0051003	.0010229	4.99
_cons	.6066789	.126547	4.79
DKIKT	-5.067391		
JABAR	-1.627591		
JATENG	.9758904		
DIY	1.399177		
JATIM	11.93567		
BANTEN	2.0331		

Sumber: Data diolah 2021

Dari tabel model regresi random effect diatas, yang memperoleh hasil constanta Provinsi Pulau Jawa sebagai berikut:

1. DKI Jakarta, memperoleh konstanta sebesar -5.067391. DKI Jakarta merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil apabila dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya.
2. Jawa Barat, memperoleh konstanta sebesar -1.627591. Jawa Barat merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil kedua setelah Provinsi DKI Jakarta.
3. Jawa Tengah, memperoleh konstanta sebesar .9758904. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terkecil ketiga setelah provinso DKI Jakarta dan Jawa Barat.
4. Daerah Isrimewa Yogyakarta, memperoleh konstanta sebesar 1.399177. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memperoleh konstanta terbesar ketiga setelah Provinsi Jawa Timur dan Banten.
5. Jawa Timur, memperoleh konstata sebesar 11.93567. Jawa Timur merupakan provini yang memperoleh konstanta terbesar apabila dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa lainnya.
6. Banten, memperoleh konstanta sebesar 2.0331. Banten merupakan provinsi yang

memperoleh konstanta terbesar kedua setelah Provinsi Jawa Timur.

Pengujian Hipotesis Uji Determinan R²

Tabel 6
Uji Determinan R²
 R square = 0.5378
 Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari uji deterian R² dapat menunjukkan bahwasanya variabel independennya sendiri berpengaruh sangat besa akan variabel dependennya. Yang mana variabel yang berpengaruh antara lain adalah variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, derajat desentralisasi iskal, serta indeks pembangunan manusia secara berbarengan mempengaruhi vareibel mempengaruhi variabel terkaitnya.

ketimpangan distribusi pendapatan mempunyai nilai sebesar 0,5378 (53,78%). Hal ini menandakan bahwasanya nilai 0,4622% mampu menjelaskan variabel bebas dan sisanya yang akan dijelaskan oleh variabel lain diluar model dalam penelitian.

Uji F

F table:
 = (α, k-1, n-k)
 = (0,05, 5-1, 36-5)
 = (0,05, 4, 31)
 = 0,40

Tabel 7
Hasil (Uji F)

Number of obs = 36	R square = 0.5378
F (5, 30) = 6.98	Adj R-squared = 4608
Prob > F = 0.0002	Root MSE = .01828

Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari pengujian dari hasil uji f diatas menandakan bahwasanya hasil ini menunjukkan nilai f hitung sebsesar 6,98 dan nilai f tabel sebesar 0,40. Emnurut hipotsis yang telah saya jelaskan sebelumnya hal ini berari menolak H₀ dan menerima H₁. Yang mana artinya adalah variabel bebasnya memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap variabel terkait. Maka dari itu dapat kita katakan bahwa variabel bebasnya berpengaruh terhadap variabel terkait secara bersamaan.

Uji Aprioari

Tabel 8
Hasil Uji Aprioari

Variabel	Hipotesis	Hasil	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	+	+	Sesuai
Upah Minimum Provinsi	-	-	Sesuai
Tingkat Pengangguran Terbuka	+	+	Sesuai
DerajatDesent ralisasiFiskal	-	-	Sesuai
Indeks Pembangunan Terbuka	-	+	TidakSesuai

Sumber: Data diolah 2021

Hasil dari uji aprioari diatas mengatakan bahwa hanya 4 dari 5 variabel yang diteliti yang memenuhi hipotesis yang diajukan. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, variabel upah minimu provinsi yang memiliki pengaruh negative. Variabel tingkat pengangguran terbuka yang memiliki pengaruh positif yang berarti sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Menurut hipotesis yang diajukan, fluktuasi tingkat desentralisasi memiliki efek negatif. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki efek positif yang tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Uji Individu Uji t

T tabel :
 = (α ; df)
 = 0,05 ; 36-5)
 = (0,05 ; 31)
 = 0,16

Tabel 9
Hasil (Uji T)

Variabel	t Hitung	t Tabel	Keterangan
X1PE	1.80	0,16	Tidak Signifikan
X2UMP	-3.69	0,16	Signifikan
X3TPT	3.12	0,16	Signifikan
X4DDF	-0.75	0,16	Tidak Signifikan
X5IPM	4.99	0,16	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah 2021

Uji-t dilakukan agar dapat mengetahui rebilitas dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran terbuka, diversifikasi fiskal, dan variabel indeks pembangunan manusia terkait,

bagaimana ketimpangan distribusi pendapatan dari Jawa. Dimana pengaruh dari variabelnya yaitu variabel bebas terhadap variabel terkait antara lain:

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa

Dari hasil yang telah tertera mwngatakan bahwa perumbuhan ekonomi melakukan tingkat kesalahan senilai 0,082. Hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan yaitu 5%. Hasil riset saya ini mengatakan bahwa adanya hasil penelitian ini menolak hipotesis yang ada dalam penelitian, yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif yang tidak ada pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh upah minimum provinsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan bahwasanya variabel upah minimum provinsi menghasilkan probabilitas senilai 0,001. Nilai ini menandakan bahwa taraf signifikan sebesar 5% menunjukkan penelitian ini menerima hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Yang mana variabel upah minimum provinsi berhubungan negatif dan tidak ada pengaruhnya terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel upah minimum provinsi sendiri mempunyai nilai koefisien sebesar 0,0502438 dengan nilai statistik sebesar 3,69. Jika nilai upah minimum provinsi turun Rp.1, ketimpangan pendapatan total berkurang 0,050238%.

Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa

Berdasarkan dari hasil uji t dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dapat memberikan probabilitas kesalahan sebesar 0,004. Hasil ini berada di bawah taraf signifikan yaitu 5%. Hasil ini

menunjukkan penerimaan hipotesis yang dikemukakan oleh hasil penelitian ini. Dengan kata lain variabel pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan yang positif. Koefisien regresi untuk tingkat pengangguran terbuka adalah 0,0056812 dengan nilai statistik 3,12. Nilai tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% meningkatkan ketimpangan total dalam distribusi pendapatan menjadi 0,0056812%.

Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan bahwasanya tingkat desentralisasi fiskal menghasilkan tingkat kesalahan dengan probabilitas 0,462. Nilai ini lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya menerima hipotesis yang diajukan. Dengan kata lain, fluktuasi tingkat diversifikasi fiskal berkorelasi negatif dengan variabel dari ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa

Berdasarkan hasil yang telah tertera pada table diatas dapat kita simpulkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia menghasilkan tingkat kesalahan senilai 0,000. Nilai yang diperoleh tersebut berada di bawah taraf signifikan yaitu 5%. Hasil ini mengatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan menerima hipotesis. Yang mana variabel indeks pembangunan manusia tidak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan.

6. PEMBAHASAN

Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwasanya variabel pertumbuhan

ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap variabel ketimpangan pendapatan, dan hasil [15] telah diperoleh yaitu menolak hipotesis. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak begitu berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Analisis pengaruh upah minimum provinsi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada penelitian ini bahwasanya variabel upah minimum provinsi mempunyai hibngan yang negative terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan, dan hasil ini tidak dengan hipotesis. Variabel upah minimum provinsi memiliki nilai koefisien sebesar 0,050248. Yang mana ketika upah minimum provinsi naik sebesar Rp.1 maka penurunan ketimpangannya sebesar 0,0502438%. Hasil penelitian ini mengataka bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dlam penelitian ini variabel tingkat pengangguran terbuka mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil riset ini menerima hipotesis yang diajukan. Variabel pengangguran terbuka memiliki nilai koefisien sebesar 0,0056812. Artinya peningkatan pengangguran terbuka senilai 1% mampu meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan sebesar 0,0056812%. Maka riset ini mengatakan bahwasanya upsh minimum provinsi sebegitu berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di pulau jawa.

Analisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktuasi derajat persebaran keuangan tidak signifikan terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan, hasil dari penelitian ini menerima hipotetsis dari penelitian ini. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa variabel derajat desentralisasi fiskal tidak sebegitu ada pengaruhnya terhadap ketimpanagn distribusi pendapatan di pulau jawa.

Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan distribusi pendapatan

Berdasarkan nilai dari table uji t veribel indeks pembangunan manusia tidak penting untuk variabel ketimpangan pendapatan, hasil penelitian saya menrima hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini mengatakan indeks pembangunan manusia tidak penting bagi ketimpangan pendapatan di Jawa.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas maka saya Tarik kesimpulan antara lain adalah:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan dapat diabaikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan. Hasil penelit [15] ini menolak hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting bagi ketimpangan pendapatan [8] Pulau Jawa.
2. Variabel upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan kekayaan. Hasilnya kon [8] ten dengan hipotesis yang diajukan. Variabel upah minimum negara memiliki nilai koefisien sebesar 0,0502438. Ini adalah upah minimum negara sebesar Rp. Artinya terjadi peningkatan 1 dan penurunan ketimpangan [16] ndapatan sebesar 0,0502438%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum

- negara berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.
3. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap variabel ketimpangan pendapatan dalam hubungan yang positif. Hasil penelitian ini menerima hipotesis yang diajukan. Nilai koefisien untuk variabel Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 0,0056812. Ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1% pengangguran yang dinyatakan, ketimpangan pendapatan meningkat sebesar 0,0056812%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum nasional berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.
 4. Tingkat variabel desentralisasi fiskal tidak memperhatikan variabel ketimpangan pendapatan, dan hasil penelitian ini mengakomodasi hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal variabel ketimpangan pendapatan tidak penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi fiskal tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa.
 5. Variabel indeks pembangunan manusia tidak penting untuk variabel ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak penting bagi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

SARAN

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka atau sering disingkat dengan (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia atau sering disingkat dengan (IPM) maka berkorelasi secara signifikan terhadap ketimpangan di Pulau Jawa dari tahun 2014 hingga 2019. Oleh karena itu, peran Jawa sangat dibutuhkan untuk lebih meningkatkan kualitas. Dari sumber daya manusia. Adanya kebijakan yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendapatan tinggi dan rendah untuk

- mengatasi kualitas sumber daya dan ketimpangan pendapatan. Pekerjaan juga harus diciptakan untuk mencegah terulangnya pengangguran.
1. Pemerintah harus berperan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan dengan pandangan yang lebih komprehensif tentang dampak keseluruhan terhadap masyarakat. Pastikan tidak ada jarak antar kelompok masyarakat.

REFERENCE

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPEE.
- Badan Pusat Statistik (2014). *Indeks Pembangunan Masyarakat 2013*. Jakarta-Indonesia: Publikasi Badan Pusat Statistik.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Keempat*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniasih, E. P. (2013). *Ketimpangan Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat Suatu Kajian terhadap Hipotesis Kuznet*. Jurnal Eksos. 9(1), 36–48.
- Soediyono. (1992). *Teori Ekonomi Mikro Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Yogya*. Yogyakarta: Liberti.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi: Pengantar Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. (2006). *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tulus T.H Tambunan, 2011. *Perekonomian Indonesia: Kaian Teoritis dan Analisis Empiris*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widarjono, A. (2013) *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya : Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Daerah.

HASIL CEK_60140762

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UM Surabaya Student Paper	4%
2	123dok.com Internet Source	2%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
4	Repository.umy.ac.id Internet Source	1%
5	id.123dok.com Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
8	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%

10	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
11	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
13	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
15	ejurnal.binawakya.or.id Internet Source	<1 %
16	Siti Nurul Noviana. "PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL DAN RASIO INFRASTRUKTUR TERHADAP KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA", Jurnal Akuntansi AKTIVA, 2020 Publication	<1 %
17	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
18	docplayer.info Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %

20	balanceyourthought.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	jurnal.untan.ac.id Internet Source	<1 %
22	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
23	journal.iaimnumetrolampung.ac.id Internet Source	<1 %
24	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
26	delfistefani.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
28	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %

32

Erni Safitri, Junaidi Junaidi, Erfit Erfit. "Analisis disparitas pembangunan antar Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi(segi ekonomi dan non ekonomi)", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2021

Publication

<1 %

33

docobook.com

Internet Source

<1 %

34

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On